PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA SENI TARI MELINTING MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

PROTECTION OF MELINTING DANCE AS HERITAGE CULTURE FROM LAMPUNG SOCIETY CUSTOM IN THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW SYSTEM

Reza Aditya Ramadhan

Law Firm Faisal Chudari & Partners
adityareza1902@gmail.com

Submitted: February 4, 2020; Reviewed: February 21, 2020; Accepted: March 5, 2020
DOI: 10.25041/iplr.v1i1.2045

Abstrak

Eksistensi Tari Melinting sebagai tari tradisional dari Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan perlindungan maksimal terhadap kekayaan intelektual komunal setempat. Permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional? Bagaimanakah peran pemerintah provinsi Lampung dalam melindungi kekayaan intelektual terhadap hak komunal tari melinting masyarakat adat provinsi lampung? Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan model perlindungan terhadap Tari Melinting. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, dilakukan pemerintah dengan cara membuat regulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk melindungi karya cipta yang dimiliki masyarakat adat Indonesia sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Peran pemerintah Provinsi Lampung dalam melindungi kekayaan intelektual terhadap hak komunal tari melinting masyarakat adat provinsi lampung terdiri dari peran normatif, yakni dengan membuat regulasi Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung. Peran ideal pemerintah Provinsi Lampung dengan cara memasukan mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler ke dalam program sekolah, agar anak-anak di zaman sekarang tidak lupa hakikat peninggalan kebudayaan leluhurnya. Adapun peran faktual yakni sebagai upaya perlindungan dan melestarikan tari melinting dilakukan dengan mengadakan kegiatan- kegiatan seperti Festival Adat, dalam berbagai kegiatan agar dikenal oleh masyarakat dan juga menunjukan eksistensi Tari Melinting tetap terjaga.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebaiknya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI selaku eksekutif dan legislatif, agar segera mengesahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung agar segera merealisasikan peraturan daerah yang mengatur tentang karya seni sebagai peninggalan masyarakat Lampung.

Kata Kunci: Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Komunal Tari Melinting, Ekspresi Budaya Tradisional

Abstract

The existence of Melinting Dance as a traditional dance from East Lampung Regency does not get maximum protection against local communal intellectual property. The problem in this article is What is the protection of intellectual property law against Traditional Cultural Expressions? What is the role of the Lampung provincial government in protecting intellectual property against the communal rights of the traditional dance of Lampung Province? This research is intended to find a model of protection for the Melinting Dance. This research uses a Normative and Empirical Juridical approach.

The research results found that the Protection of Intellectual Property Laws against Traditional Cultural Expressions is carried out by the government by making regulations Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. To protect the masterpiece of Indonesian indigenous peoples, the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia has designated the Indonesian Intangible Cultural Heritage. The role of the Lampung Province government in protecting intellectual property against the communal rights of the traditional dance of Lampung Province consists of a normative role, namely by making regulations concerning the Protection of the Lampung People Intellectual. The ideal role of the Lampung Province government is by subjects and extracurricular in the school program, so children today do not forget the inheritance of their ancestors' culture. The factual role that is as an effort to protect and preserve the Melinting dance is done by holding activities such as the Traditional Festival, in various activities to be known by the public and also to show the existence of the Melinting Dance is maintained.

As for the suggestions that can be conveyed in this study, the government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia as the executive and legislative branch should immediately pass the Law on the Protection and Utilization of Intellectual Property Rights of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions. The Lampung Provincial Government should immediately realize the regional regulations governing art as a relic of the people of Lampung.

Keywords: Protection of Intellectual Property Rights Communal Melinting Dance, Traditional Cultural Expressions

A. Pendahuluan

Kebudayaan pada bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang muncul dari hasil usaha rakyat Indonesia sepenuhnya.¹ Selain itu, Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan tradisi dan budayanya, hal ini yang menjadi daya tarik Indonesia.² Kebudayaan Indonesia memiliki keberagaman yang muncul dari berbagai suku-suku pada wilayah Indonesia.³ Jenis kebudayaan Indonesia terdiri dari pakaian, upacara, rumah adat, kesenian daerah, dan lain-lain.⁴ Adapun Indonesia memiliki 1.128 suku dengan lebih dari 300 bahasa

¹ Amri Marzali, "MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA," *Humaniora* 26, no. 3 (2014): 251-265, 253, DOI: 10.22146/JH.6183.

² Muhammad Wasal Falah, Yeni Jayanti, and Sutri Utami, "SEBAGAI SARANA INFORMASI SEKALIGUS UNTUK MEMPERKENALKAN BUDAYA INDONESIA PADA MASYARAKAT DI PERBATASAN," *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Tertulis 2013* (Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, 2013), 1-10, 5.

³ Camelia Arni Minandar, "AKTUALISASI PIIL PESENGGIRI SEBAGAI FALSAFAH HIDUP MAHASISWA LAMPUNG DI TANAH RANTAU," *SOSIETAS* 8, no. 2 (2019): 517-526, 518, DOI: 10.17509/sosietas.v8i2.14594.

⁴ Lintje Anna Marpaung, "URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 120-131, 127, DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10204.

daerah, dan lebih dari 3000 tarian asli Indonesia.⁵ Menjaga eksistensi kebudayaan adalah hal yang sangat penting karena kebudayaan merupakan asset identitas suatu bangsa.⁶ Pembangunan dan pengembangan sosial budaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kebudayaan, mengembangkan nilai budaya baru, dan meningkatkan pelestarian, dan pengembangan kebudayaan Indonesia.⁷

Budaya dan adat istiadat merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT yang dapat terus berkembang hingga penjuru dunia.⁸ Perlindungan terhadap kebudayaan dalam suatu Negara dikarenakan untuk menjamin pelaksanaan pembagian royalti yang didapat dari hasil karya ciptanya bagi pemilik pengetahuan. Namun demikian dalam kenyataannya hal ini tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Isu penting yang harus menjadi fokus perhatian adalah pihak mana yang akan dipertimbangkan sebagai pemilik suatu pengetahuan tradisional, yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, siapa, bagaimana, dan mengapa pihak tersebut dapat menjadi pemilik pengetahuan tradisional.⁹ Menurut Ahmad Ubbe, EBT mempunyai perbedaan karakteristik tersendiri dari ciptaan pada umumnya, dikarenakan kepemilikan EBT tidak mempunyai legalitas untuk mengklaim memiliki secara individual tetapi EBT dimiliki oleh masyarakat pengembannya sebagai warisan turun temurun dan dilanjutkan dari generasi ke generasi, berbeda dengan ciptaan pada umumnya yang pada dasarnya dimiliki secara individual.¹⁰

Era modern perdagangan bebas saat ini membuat berbagai negara di dunia berlomba mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Hal ini merupakan latar belakang pentingnya menjaga serta memberikan perlindungan terhadap EBT. Berdasarkan hukum internasional, EBT dilindungi oleh Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda 2003 atau Konvensi UNESCO 2003.¹¹ Sedangkan di Indonesia EBT diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014).¹² Diperlukannya perlindungan hukum terhadap EBT sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu karena adanya potensi ekonomi yang menjanjikan dari EBT dengan adanya berbagai komersialisasi terhadap EBT hingga tingkat global.¹³

Salah satu permasalahan dalam Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dan EBT yaitu Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dan EBT kerap kali dicari dan diperoleh tanpa izin, dan tidak memberikan kontribusi kepada pemiliknya seperti kontribusi terhadap negara dan masyarakat.¹⁴ Hukum Kekayaan Intelektual mengatur tentang perlindungan karya sastra,

⁵ Bayangsari Wedhitami, "UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH," *LAW REFORM* 9, no. 2 (2014): 32-48, 33, DOI: 10.14710/lr.v9i2.12444.

⁶ Hildgardis M.I Nahak, "UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI," *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (June 25, 2019): 65-76, 167, DOI: 10.33369/jsn.5.1.65-76.

⁷ Fridolin and Wisora Balida, "KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENJAGA EKSISTENSI NILAI KEBUDAYAAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): 1-13, 2.

⁸ Kholis Roisah, "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379, 373, DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.372-379.

⁹ Rohaini Rohaini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2016): 428-449, 429, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.609.

¹⁰ Ahmad Ubbe, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), 39.

¹¹ Miranda Risang Ayu, "SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 205-220, 211, DOI: 10.22146/jmh.16671.

¹² Dyah Permata Budi Asri, "PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23, 18.

¹³ Rahman Hasima, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT TOLAKI," *Literasi Hukum* 2, no. 1 (2018): 15-27, 22.

¹⁴ *Ibid.*, 5.

artistik dan invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.¹⁵ pencipta Seorang pencipta karya seni harus diakui keberadaannya baik oleh masyarakat maupun diakui oleh hukum, hal tersebut dikarenakan dalam proses penciptaan suatu karya bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan.¹⁶

Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works atau Konvensi Bern 1967 memuat tentang prinsip-prinsip dan aturan tentang hak cipta serta konsep kepemilikan karya cipta yang bersifat anonim "*anonymous works*". Namun Konvensi Bern 1967 tidak mengatur perlindungan EBT secara khusus, tetapi substansi pada konvensi ini tetap dapat diterapkan pada karya budaya yang tidak diketahui penciptanya.¹⁷ Ketentuan dalam Konvensi Bern yang mengatur tentang "*anonymous works*" yang diatur dalam Pasal 15 paragraf 4: "bahwa negara-negara pihak Konvensi Bern mempunyai kewajiban menunjuk otoritas yang berkompeten berdasarkan ketentuan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui penciptanya untuk mewakili kepentingan pencipta dan melindungi hak-hak pencipta".¹⁸ Konvensi Bern 1967 diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 (Kepres No.18 Tahun 1997).¹⁹

Indonesia telah menjadi negara yang telah menyetujui segala ketentuan internasional terkait kekayaan internasional, hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Bern 1967 oleh Indonesia melalui Kepres No. 18 Tahun 1997. Dengan demikian, retifikasi ini merupakan pernyataan Indonesia terkait adanya kebutuhan atas pengakuan kekayaan intelektual. Pengakuan ini merupakan bukti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai bentuk kebutuhan dalam perlindungan dan penghargaan terhadap karya intelektual.²⁰ Adanya perkembangan teknologi semakin mendukung arti penting peranan Kekayaan Intelektual atau KI di berbagai negara. Banyaknya permohonan karya yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hak merek, hak paten, dan hak cipta merupakan bukti bahwa kekayaan intelektual memiliki arti penting di era saat ini. Dengan demikian, diperlukan adanya perhatian lebih dan promosi khusus terkait KI oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat umum.

Salah satu provinsi yang kaya akan budayanya yaitu Provinsi Lampung. Lampung memiliki beraneka ragam kebudayaan, salah satunya yaitu tari melinting yang berasal dari salah satu kabupaten di provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur. Tari Melinting adalah tarian khas yang ditampilkan pada masa Kerajaan Melinting di Lampung Timur, namun seiring perkembangan zaman Tari Melinting menjadi tarian rakyat dan kerap kali ditampilkan dalam acara budaya, upacara penyambutan, dan perayaan lainnya.²¹ Pada dasarnya Tari Melinting terbagi dalam tiga bagian yaitu tarian pembuka, tarian inti, dan tarian penutup.²²

Semakin majunya perkembangan provinsi Lampung di era digital ini, semakin mempermudah akses internet tentang pengetahuan kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu. Apalagi timbul kasus tentang pengakuan salah satu budaya Indonesia yang di *klaim*

¹⁵ Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2002), 2.

¹⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 2.

¹⁷ Kholis Roisah, *Jurnal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), 374.

¹⁸ Bern Convention for the Protection Of Literary and Artistic Works Article 15 Paragraf 4

¹⁹ Oksidelfa Yanto, "FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 108-122, 114.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi dan Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 9

²¹ Indra Bulan, "TARI MELINTING TARI MELINTING DI MASA LALU DAN MASA KINI," *Jurnal Seni Tari* 8, no. 1 (2019): 95–102, 102, DOI: 10.15294/jst.v8i1.24899.

²² Rahma Fatmala, "ANALISIS KOREOGRAFI TARI MELINTING LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR," *Joged* 13, no. 1 (2019): 91–101, 94, DOI: 10.24821/joged.v13i1.2810.

milik negara lain. Pentingnya melindungi aset budaya yang ada di negara Indonesia melalui KI. Masyarakat harus mengetahui tentang hukum dan peduli dengan peninggalan budaya kearifan lokal yang harus selalu terjaga keasliannya, Mengingat banyaknya suku, ras dan budaya yang tidak semuanya terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Komunal Tari Melinting Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Provinsi Lampung”. Permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap Ekspresi Budaya Tradisional? Bagaimanakah peran pemerintah provinsi Lampung dalam melindungi kekayaan intelektual terhadap hak komunal tari melinting masyarakat adat provinsi lampung? Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan model perlindungan terhadap Tari Melinting. Metode penelitian pada artikel ini berdasarkan pada pendekatan normatif-empiris. Adapun pendekatan normatif merupakan penelitian terhadap segala hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum,²³ sedangkan pendekatan empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal nyata dalam masyarakat.²⁴

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap EBT

Agar karya dan Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa Indonesia diketahui oleh masyarakat Internasional, maka pemerintah Indonesia selama ini melakukan perlindungan karya tersebut melalui upaya klaim oleh organisasi kebudayaan Internasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan upaya tersebut, namun pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap bangsa Indonesia kerap kali terjadi. Menurut wawancara dengan R Hari Widiyanto Jayaningrat selaku Kepala Seksi Kesenian Hari Jayaningrat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Saat ini Tari Melinting masih digunakan oleh masyarakat adat Lampung dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan juga acara penyambutan acara pertemuan tokoh adat, walau pun jumlahnya sangat terbatas dikarenakan biaya penyelenggaraannya mahal. Mengingat secara empiris tari Melinting masih eksis di tengah-tengah masyarakat Lampung, maka sudah seharusnya keberadaan Tari Melinting tersebut sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) untuk layak mendapatkan perlindungan hukum baik oleh pemerintah daerah di provinsi melalui pembuatan suatu kebijakan yang tertuang di dalam sebuah peraturan daerah baik di tingkat Provinsi Lampung, maupun di tingkat Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung.²⁵

Tari melinting merupakan tarian tradisional dari wilayah Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tarian ini memiliki filosofi yang mendasari munculnya tradisi pada kehidupan masyarakat Melinting, Lampung Timur.²⁶ Secara yuridis perlunya perlindungan terhadap Tari Melinting berkaitan dengan adanya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang eksistensi Tari Melinting di masyarakat Lampung, baik bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat Provinsi Lampung.

²³ Muhammad Rizqi Fadhilillah and Dwi Andayani, “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 LEGAL SATISFACTION OF TEMPORARY STOPPING OF GOVERNOR OF DKI JAKARTA IN 2017,” *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 23–27, 25, DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1892.

²⁴ Andriawan Kusuma et al., “GANTI RUGI TANAH SISA PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR; AKIBAT HUKUM DAN KONFLIK PERTANAHAN (COMPENSATION FOR REMAINING LAND IN THE CONSTRUCTION OF THE BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR TOLL ROAD; DUE TO LAWS AND LAND CONFLICTS),” *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 41–54, 43, DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1785.

²⁵ Wawancara dengan Bapak R. Hari Jayaningrat, Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung, pada tanggal 23 Juli 2019.

²⁶ T. Dibyo Harsono, “TARI MELINTING: SENI TARI TRADISIONAL LAMPUNG TIMUR,” *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1 (2014): 123–133, 123, DOI: 10.30959/patanjala.v6i1.190.

Peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap Tari Melinting adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 38 yang mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).²⁷ Tari Melinting Lampung dikatakan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional karena gerakan tari Melinting, serta bentuk dan ekspresi pada tarian Melinting selain terdapat nilai seni, juga terdapat simbol-simbol yang mengandung makna filosofis yang dianut masyarakat Lampung. Hal ini sejalan dengan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya”.²⁸

Menurut wawancara dengan R Hari Widiyanto Jayaningrat selaku Kepala Seksi Kesenian Hari Jayaningrat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menyikapi perlindungan budaya Lampung diwujudkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelestarian Budaya Lampung ada hal yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung seperti kain, peralatan, lagu daerah, tarian-tarian klasik Tradisional dan sudah didaftarkan di nasional sebagai Warisan Budaya Tak Benda serta cagar-cagar budaya yang ada di daerah Lampung, namun ada sebagian warisan budaya Lampung yang belum terdata di nasional sehingga pemerintah lagi berupaya mendaftarkannya. Menurutnya peninggalan adat Lampung yang sudah mendunia adalah Kain Tapis. Kain Tapis sudah diakui dunia karena menceritakan sejarah masyarakat Lampung dikain Tapis tersebut seperti masyarakat Lampung kaya akan sumber daya alam seperti laut, hasil hutan.²⁹

Menurut wawancara dengan R Hari Widiyanto Jayaningrat selaku Kepala Seksi Kesenian Hari Jayaningrat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tari Melinting sendiri sudah ditetapkan di oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Pada Tanggal 17 Oktober 2014 secara tidak langsung Negara sudah mengakui eksistensi tari Melinting sebagai peninggalan masyarakat Lampung.

Berbeda dengan wawancara Masriakromi selaku Kepala Subidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung (selanjutnya disebut Kemenkumham) bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual komunal budaya Lampung jika dulu disebut foklor akan tetapi sekarang pendaftaran Kekayaan Intelektual komunal tidak ada biaya pendaftaran sama sekali.³⁰

Berdasarkan wawancara Masriakromi selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung selama ini Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung sudah melakukan kunjungan sosialisasi ke berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mewacanakan agar melakukan pendaftaran warisan-warisan budaya Lampung yang ada didaerahnya .

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan selaku staf Dirjen KI Kemenkumham Provinsi Lampung Bahwa menyikapi jenis budaya Lampung yang sudah didaftarkan di Dirjen Hak Cipta Kemenkumham ada 4 yakni Tapis Lampung, Pesta Sekura, Pesta Radin Jambat, dan Cangget Agung. Jadi selama ini tari Melinting belum di daftarkan di Dirjen Hak Cipta Kemenkumham Provinsi Lampung, karena tari Melinting sendiri tidak masuk lingkup hak cipta karena hal tersebut bukan milik pribadi tapi milik warisan budaya adat Lampung yang

²⁷ Anak Agung Sinta Paramisuari and Sagung Putri M.E. Purwani, “PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16, 2. DOI: 10.24843/km.2018.v07.i01.p04.

²⁸ Abdul Atsar, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 284-299, 289, DOI: 10.14710/lr.v13i2.16162.

²⁹ Wawancara dengan Bapak R. Hari Jayaningrat, Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung, pada tanggal 23 Juli 2019.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Masriakromi, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Pada tanggal 18 Juli 2019.

bersifat komunal/milik bersama, jadi tidak bisa didaftarkan akan tetapi hanya bisa dicatatkan saja.³¹

2. Peran Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Komunal Tari Melinting Masyarakat adat Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman warisan budaya tradisional. Seperti kerajinan tenun kain tapis, lagu-lagu daerah, alat musik hingga tarian tradisional. Kesenian di Lampung merupakan salah satu aspek penting yang telah menjadi identitas masyarakat Lampung.³² Peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi warisan kebudayaan Lampung berupa kebijakan secara hukum dan non-hukum. Bentuk kebijakan secara hukum berupa: Membuat dan membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dan yang terakhir memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.

Sebagaimana maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung di dalam Pasal 2 tersebut dinyatakan Maksud Perlindungan Karya Intelektual adalah untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung. Sedangkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dalam melindungi tari Melinting, berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan dalam bentuk kebijakan legislasi. Hal ini dapat diketahui bahwa belum ada kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki Peraturan Daerah atau Perda yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pelestarian tari Melinting.

Berdasarkan wawancara dengan Dwi Aprilia Iestari selaku Kasubag Penyusunan Perundang-undangan sekretariat DPRD Provinsi Lampung tari selama ini pelestarian terhadap budaya Lampung hanya sebatas membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Perda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dan yang terakhir memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.³³

Memang patut disayangkan menurut peneliti tari Melinting perlu dipertunjukkan dalam perayaan kebudayaan masyarakat Lampung seperti menyambut tamu negara. Karena apabila Tari Melinting ini tidak pernah dipertunjukkan maka tarian ini tidak akan dikenal oleh masyarakat Lampung apalagi masyarakat di luar Lampung hingga mancanegara. Sehingga tari Melinting akan hilang eksistensinya sebagai warisan adat Lampung, atau bahkan dapat diklaim oleh negara lain.

Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi tari Melinting yakni berkaitan aspek substansi, struktur dan kultur hukum masyarakat Lampung. Secara substansi hukum bentuk kendalanya yaitu saat ini kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan tari Melinting dari ketiga regulasi seperti Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Perda Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur

³¹ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Staff Dirjen KI Kemenkumham Provinsi Lampung, Pada tanggal 18 Juli 2019.

³² Ade Prabowo, Ali Imron, Henry Susanto, "SIMBOL DAN MAKNA TARI MELINTING PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI DESA WANA", *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)* 6, no. 4 (2018): 1-12, 2.

³³ Wawancara dengan Ibu Dwi Aprilia Iestari, Kasubag Penyusunan PerUUan sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Pada Tanggal 25 Juli 2019.

Bangunan Gedung Berornamen Lampung dan yang terakhir memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut tidak secara eksplisit mengenai tari Melinting sebagai objek perlindungan berdasarkan warisan peninggalan budaya Lampung.

Kondisi diatas telah direspon oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama- sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dengan cara mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Lampung tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Raperda tentang Pelestarian Warisan Budaya Lampung, walaupun telah diusulkan sejak tahun 2014 namun hingga saat ini belum juga disahkan menjadi Peraturan Daerah.

C. Penutup

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan pemerintah dengan cara membuat regulasi untuk melindungi karya cipta yang dimiliki masyarakat adat Indonesia yakni dengan menerbitkan peraturan yaitu Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional juga dalam melakukan perlindungan dilakukan dengan cara menginventarisir semua aset-aset peninggalan kebudayaan yang dimiliki dan menjadi ciri khas masyarakat adat yang ada di Indonesia tersebut. Salah satu contohnya adalah seperti tari melinting yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Pada Tanggal 17 Oktober 2014. Secara otomatis negara sudah berupaya dalam melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat adat setempat.

Peran pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual terhadap hak komunal Tari Melinting masyarakat adat provinsi Lampung terdiri dari peran normatif peran ideal dan peran faktual. Peran normatif yakni dengan membuat beberapa regulasi misalnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dan yang terakhir memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung. Peran ideal dilakukan dengan cara memasukan mata pelajaran dan juga ekstrakurikuler ke dalam program sekolah agar anak-anak di zaman sekarang tidak lupa hakikat peninggalan kebudayaan leluhurnya dan Peran Faktual dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan kegiatan- kegiatan seperti Festival Adat, acara Begawi Adat, dan acara Pemberian Gelar Adat kepada para tokoh daerah dan nasional dalam berbagai kegiatan agar dikenal oleh masyarakat sekaligus mempromosikan kepada khalayak umum dan juga menunjukan eksistensi Tari Melinting tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1, 2018: 13-23.
- Atsar, Abdul. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Law Reform* 13, no. 2, 2017: 284-299, DOI: 10.14710/lr.v13i2.16162.
- Ayu, Miranda Risang. "SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA." *Mimbar Hukum* 29, no. 2, 2017: 205-220, DOI: 10.22146/jmh.16671.
- Bulan, Indra. "TARI MELINTING TARI MELINTING DI MASA LALU DAN MASA KINI." *Jurnal Seni Tari* 8, no. 1, 2019: 95-102, DOI: 10.15294/jst.v8i1.24899.
- Fadhilillah, Muhammad Rizqi., Andayani, Dwi. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 LEGAL SATISFACTION OF TEMPORARY STOPPING OF GOVERNOR OF DKI JAKARTA IN 2017." *Cepalo* 4, no. 1, 2020: 23-27, DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1892.
- Falah, Muhammad Wasal., Jayanti, Yeni., Utami, Sutri. "SEBAGAI SARANA INFORMASI SEKALIGUS UNTUK MEMPERKENALKAN BUDAYA INDONESIA PADA MASYARAKAT DI PERBATASAN." *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Tertulis 2013*, Indonesian Ministry of Research, Technology and Higher Education, 2013, 1-10.
- Fatmala, Rahma. "ANALISIS KOREOGRAFI TARI MELINTING LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." *Joged* 13, no. 1, 2019: 91-101, DOI: 10.24821/joged.v13i1.2810.
- Fridolin., Balida, Wisora. "KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENJAGA EKSISTENSI NILAI KEBUDAYAAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 2, 2015: 1-13.
- Harsono, T. Dibyo. "TARI MELINTING: SENI TARI TRADISIONAL LAMPUNG TIMUR." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1, 2014: 123-133, DOI: 10.30959/patanjala.v6i1.190.
- Kusuma, Andriawan. "GANTI RUGI TANAH SISA PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR; AKIBAT HUKUM DAN KONFLIK PERTANAHAN (COMPENSATION FOR REMAINING LAND IN THE CONSTRUCTION OF THE BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR TOLL ROAD; DUE TO LAWS AND LAND CONFLICTS)." *Cepalo* 3, no. 1, 2019: 41-54, DOI: 10.25041/cepalo.v3no1.1785.
- Marpaung, Lintje Anna. "URGENSI KEARIFAN LOKAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2, 2013: 120-131, DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10204.
- Marzali, Amri. "MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA." *Humaniora* 26, no. 3, 2014: 251-265, DOI: 10.22146/JH.6183.
- Minandar, Camelia Arni. "AKTUALISASI PIIL PESENGGIRI SEBAGAI FALSAFAH HIDUP MAHASISWA LAMPUNG DI TANAH RANTAU." *SOSIETAS* 8, no. 2, 2019: 517-526, DOI: 10.17509/sosietas.v8i2.14594.

- Nahak, Hildgardis M. I. "UPAYA MELESTARIKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1, 2019: 65–76, DOI: 10.33369/jsn.5.1.65-76.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta., Purwani, Sagung Putri M. E. "PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1, 2019: 1-16, DOI: 10.24843/km.2018.v07.i01.p04.
- Prabowo, Ade., Imron, Ali., Susanto, Henry. "SIMBOL DAN MAKNA TARI MELINTING PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI DESA WANA", *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)* 6, no. 4, 2018: 1-12.
- Rohaini Rohaini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4, 2016: 428-449, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.609.
- Rohaini Rohaini. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (April 19, 2016): 428-449, DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.609.
- Roisah, Kholis. "PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3, 2014: 372–379, DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.372-379.
- Wedhitami, Bayangsari. "UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." *LAW REFORM* 9, no. 2, 2014: 32-48, DOI: 10.14710/lr.v9i2.12444.
- Yanto, Oksidelfa. "FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1, 2015: 108-122.

B. Buku

- Lindsey, Tim. *Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi dan Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ubbe, Ahmad. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.

C. Peraturan

- Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional

Rancangan Undang-Undang Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya
Tradisional
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta